

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Implementasi kebijakan merupakan salah satu langkah penting dalam struktur pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang melibatkan pelaksanaan keputusan dasar yang telah dibuat, seringkali dalam bentuk undang-undang. Namun, tidak jarang kebijakan juga dibuat dalam bentuk keputusan eksekutif yang signifikan atau perintah. Proses implementasi sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam mewujudkan visi dan misi kebijakan. Sukses dalam menerapkan kebijakan memerlukan struktur yang jelas dan mekanisme pengaturan yang baik untuk memberikan dampak positif dan memberdayakan masyarakat secara optimal (Nurkholis, 2007).

Pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk sekarang dan masa depan. Salah satu kebijakan utama yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, khususnya transformasi infrastruktur adalah prioritas program/proyek infrastruktur yakni melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan telah berhasil memperbaiki kondisi perekonomian, baik dalam skala regional maupun nasional. Perbaikan kondisi perekonomian tersebut dapat ditempuh dengan jalan memanfaatkan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam

pembangunan, karena sumber daya manusia yang rendah menjadikan kondisi masyarakat kurang mampu dalam melihat serta mengatasi masalah hidupnya, yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Oleh karena itu usaha pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang harus dan perlu dilakukan.

Pengembangan wisata berkelanjutan dengan perawatan yang baik terhadap Pantai cemara dan manajemen yang efektif oleh BUMG, Pantai cemara dijadikan objek wisata yang menarik, pengelolaan yang baik ini membawa dampak positif pada citra dan keberlanjutan lingkungan. Sinergi dengan kebijakan pusat keterlibatan Meteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (Mendes PDDT) dalam meresmikan desa wisata menunjukkan dukungan pemerintah pusat terhadap Pembangunan lokal. Dengan menjaga kualitas pengelolaan, pantai cemara memiliki potensi yang menjadi asset ekonomi yang berkelanjutan bagi desa, memberikan contoh positif untuk pengembangan destinasi wisata lainnya, serta memperkuat implementasi kebijakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus yang memiliki anggaran yang cukup besar dibandingkan dengan daerah lainnya membuat pemerintah daerah Aceh lebih banyak memiliki program yang bermanfaat untuk membantu mengentaskan kemiskinan dengan berbagai macam program unggulan. Salah satu program unggulan pemerintah Aceh adalah “Desa Wisata” Sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan, Pemerintah mengembangkan desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat,

menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola daerah melalui hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata. Dengan otonomi ini, penyelenggara pariwisata dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mengembangkan pariwisata untuk menguntungkan semua pihak.

Berdasarkan Peraturan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3 Tentang Pengembangan Desa wisata juga merupakan salah satu bentuk percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Karena itu, tiap daerah dan desa perlu mencermati potensi yang dimilikinya untuk diangkat dan dikembangkan agar memberikan nilai tambah manfaat serta menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Bireuen dalam Bab V Pasal 6 Ayat 4 dan 6 mengenai sarana dan prasarana dan juga mengenai pengelolaan kawasan wisata yang memenuhi standar keamanan pada objek wisata. Apalagi Desa Lingakuta diresmikan sebagai salah satu Desa Wisata di Bireuen oleh Menteri Desa. Pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2023. Lokasi objek wisata Pantai ini hanya sekitar 1,5 Km dari arah utara keude Geureugok, Ibu kota kecamatan Gandapura, Kabupaten bireuen. Lokasinya yang cukup strategis, wisatawan lokal relatif tinggi untuk saat ini terutama di daerah Bireuen.

Berdasarkan *Buku Pedoman Desa Wisata Kementrian parawisata Tahun 2019*, Desa Wisata merupakan suatu bentuk penyesuaian antara akomodasi, aktraksi dan fasilitas pendukung lainnya yang disajikan pada suatu struktur yang menyatu dengan kehidupan masyarakat setempat. Oleh karenanya, Desa Wisata harus memiliki konsep yang matang agar menarik untuk dikunjungi wisatawan. Konsep dari Desa Wisata adalah dengan menjadi desa sebagai tujuan wisata. Dengan cara memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, layanan fasilitas umum pariwisata, serta aksesibilitas yang memadai, dengan tata cara dan budaya dari desa tersebut. Prinsip utama dari desa wisata dengan fokus kepada pemberdayaan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi wisata setempat.

Berdasarkan observasi awal melalui pengamatan langsung, peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan wisata di Lingka Kuta, Kabupaten Bireuen, yang dimana sudah terlihat bahwa dengan berhasilnya resmi menjadi Desa Wisata. Berkat bantuan Keuchik dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam membangun dan memelihara Pantai Cemara memberikan dampak positif, dimana dampak positif tersebut mulai dari pengangguran-pengangguran hingga pertumbuhan ekonomi yang sudah meningkat, tetapi masih ada permasalahan dalam komunikasi di desa tersebut.

Diharapkan bahwa besarnya pengaruh pariwisata terhadap masyarakat akan membuat masyarakat lebih menyadari betapa pentingnya pertumbuhan pariwisata. Memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat karena interaksi langsung dengan pengunjung. Untuk menjamin keamanan pengunjung, masyarakat perlu memperhatikan kebersihan lingkungan, menjaga keindahan

alam, dan memelihara ketertiban dengan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, penting juga untuk menyediakan akses transportasi yang aman dan nyaman serta jalan yang baik menuju tempat wisata.

Berdasarkan pendataan penduduk kabupaten Bireuen Tahun 2023, jumlah penduduk sebanyak 441.895 jiwa dengan jumlah kunjungan yang meningkat:

Tabel 1.1 Objek Wisata dan Jumlah Kunjungan dalam Tahun 2021-2023

No	Objek Wisata	Jumlah Kunjungan
1	Cot Panglima	12.871
2	Krueng Simpo	28.776
3	Air Terjun Piramida	3.211
4	Makam Tun Sri Lanang	25.766
5	Pantai Krueng Juli Barat	21.299
6	Pantai Kuala Jangka	32.765
7	Pantai Reuleng Manyang	18.762
8	Rumah Tgk Awe Geutah	30.765
9	Pantai Peuneulot Baroh	12.877
10	Pantai Ujoeng Seuke	29.865
11	Batee Iliek	37.654
12	Batee Krueng dan Tugu Perjuangan	3.792
13	PPI Peudada	23.547
14	Rumah Tgk Awe Geutah	22.217
15	Waduk Paya Laot	5.765
16	Pantai Ujong Blang	28.877
17	Pantai Cemara	38.765
18	Air Terjun Ceuraceuk	12.876
19	Air Terjun Ie Rhop	22.764
20	Pantai Kuala Pawoen	17.654
Total		430.868

Sumber: Disporapar Bireuen, 2024

Tabel 1.1 di atas, menjelaskan mengenai jumlah kunjungan wisatawan dalam 2 tahun terakhir di Kabupaten Bireuen, dimana jumlah yang paling banyak dikunjungi yaitu di Pantai Cemara, Batee Iliek, Pantai Ujong Blang, dan juga wisata Krueng Simpo. Jumlah pengujung di Pantai Cemara mencapai 38,765 wisatawan, kemudian dilanjutkan wisata Batee Iliek mencapai 37,654 wisatawan,

wisata Pantai Ujong Blang mencapai 28,877 wisatawan dan objek wisata terakhir dikunjungi yaitu Krueng Simpo sebanyak 28,776 wisatawan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara awal dengan bapak Surya Dharma S.H sebagai tokoh masyarakat, mengatakan bahwa dalam implementasi pengelolaan objek wisata Pantai Cemara yang menjadi masalah utama adalah komunikasi, dimana komunikasi antar aktor yang terlibat sangat diperlukan, nyatanya komunikasi yang dibangun belum cukup baik dan masih terdapat mis komunikasi antar aktor. Selanjutnya sumber daya seperti sumber daya manusia sangat diperlukan dalam pengelolaan objek wisata, tetapi sumber daya yang ada di Pantai Cemara belum mencukupi untuk dapat membantu pengelolaan secara lanjut dan yang terakhir adalah birokrasi (Wawancara awal, 10 Oktober 2024).

Pantai Cemara dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang notabene diisi oleh pemuda desa setempat. Selama menjadi destinasi wisata, para pemuda juga sudah mempunyai pekerjaan tetap sehingga mengurangi pengangguran di desa. Pemandangan pantai yang cukup indah ditambah pohon cemara yang dirawat dengan rapi, menjadikan objek wisata tersebut kian memukau para pengunjung. Sajian makanan dan minuman yang diperjual belikan, juga terbilang murah dan pastinya enak untuk dicicipi. Fenomenanya hadirnya wisata Pantai Cemara memberikan kemudahan pekerjaan bagi pemuda yang mengalami pengangguran, tidak hanya itu masyarakat yang sebelumnya berpendapatan rendah, setelah adanya Pantai Cemara dapat meningkatkan pendapatan mereka, meskipun hal tersebut tidak dirasakan oleh semua masyarakat lokal.

Namun dibalik fenomena yang terjadi setelah adanya pengelolaan wisata Pantai Cemara, juga terdapat berbagai permasalahan dalam bidang pengelolaan pariwisata seperti belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata dan masih kurang memadainya penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan promosi pariwisata. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2021 Bab V Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata dalam Pasal 6 Ayat 4 dimana pengelolaan kawasan wisata harus memenuhi standar keamanan, kesehatan dan kebersihan. Artinya pengelolaan wisata pantai cemara harus mempunyai standar keamanan baik keamanan bagi kendaraan (adanya parkir), kemudian pengelolaan pantai cemara juga harus memenuhi standar kebersihan, seperti sampah-sampah yang tidak dibuang sembarangan dan lainnya. Namun, kenyataanya pengelolaan kawasan wisata pantai cemara dalam hal kebersihan belum maksimal, dimana kebersihan masih sangat minim sekali, banyak sampah yang berserakan yang tidak dimasukkan kedalam tempatnya seperti sampah pampers, sampah botol plastik, dan ada juga sampah yang sudah berjatuh ke tambak udang milik masyarakat sekitar.

Kemudian dalam pasal 6 ayat 6 dimana kawasan wisata harus mempunyai sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah dengan pengelolaannya yang harus disetujui dan disepakati oleh pemerintah melalui Disporapar. Seperti pembangunan jalan yang harus memadai. Namun, sampai saat ini masih terdapat jalan yang rusak dan tergenang air ketika hujan turun. Selanjutnya pembangunan MCK yang harus memenuhi standar kebersihan. Pembangunan pondok yang juga masih dibangun oleh pedagang di Pantai Cemara menggunakan biaya dari hasil pendapatan mereka. Namun, pengelolaan yang saat ini terjadi di pantai cemara

yaitu tanpa sentuhan tangan Disporapar dan hanya di kelola oleh pihak BUMG tanpa diketahui dan diberitahukan pada pihak Disporapar.

Berdasarkan latar belakang diperlukan pengelolaan lingkungan yang sistematis oleh pemerintah desa. Mengingat hal tersebut, pengelolaan destinasi wisata dapat dikatakan sangat penting karena menyangkut perubahan keadaan saat ini. Tanpa adanya pengelolaan tempat wisata, maka tidak akan ada pengembangan atau perubahan terhadap obyek tersebut. Jika dikelola dengan baik, sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan pengelolaan Wisata di Pantai Cemara?
2. Apa saja pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan pengelolaan Wisata Pantai Cemara?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Implmentasi Kebijakan pengelolaan Wisata Pantai Cemara terfokus pada sarana dan prasarana, standar keamanan dan kebersihan.
2. Pendukung dan penghambat dalam menjalankan Implementasi kebijakan pengelolaan wisata Pantai Cemara terfokus pada komunikasi, dan sumber daya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan Wisata Pantai Cemara terfokus pada sarana dan prasarana, standar keamanan, kesehatan dan kebersihan.
2. Untuk mengetahui pendukung dan penghambat dalam menjalankan Implementasi kebijakan pengelolaan wisata Pantai Cemara terfokus pada komunikasi dan sumber daya.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini dilakukan dengan manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang implementasi kebijakan pengelolaan wisata Pantai cemara di lingka kuta.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi kepustakaan serta menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengurus ataupun masyarakat desa wisata pantai cemara.